# PROGRESS PRODUK HUKUM YANG SEDANG PROSES PERSETUJUAN MENTERI PERHUBUNGAN

# POSISI PEKERJAAN BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI DARAT DAN PERKERETAAPIAN

# PERATURAN TRANSPORTASI DARAT

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 2026 | Dalam Pembahasan RUU tingkat Kementerian/Lembaga untuk dilaporkan ke Menteri Sekretaris Negara dan disampaikan ke DPR oleh Presiden |
| 2. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A | 2026 | Menunggu justifikasi dan surat dari Direktur Prasarana untuk penjelasan kepada Menteri Perhubungan |
| 3. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan | 2026 | Penjelasan Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Menteri Perhubungan |
| 4. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Analisi Dampak Lalu Lintas | 2026/2027 | Telah dilakukan rapat di Biro Hukum dan menunggu justifikasi dari Direktorat Lalu Lintas terkait substansi materi Rancangan Peraturan Perhubungan |
| 5. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum | 2026 | Penjelasan Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Menteri Perhubungan |

# PERATURAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi | 2026 | Menunggu persetujuan Kementerian Keuangan terkait pendanaan dan operasional kereta cepat |
| 2. | RPM Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik | 2026 | Menunggu Dirjen Perkeretaapian memberikan penjelasan langsung kepada Menhub untuk mohon ttd sebelum disampaikan kepada Kementerian Hukum (selesai harmonisasi) |
| 3. | RPM tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Lokomotif | 2026 | Sudah selesai pembahasan internal Kemenhub dan menunggu Ditjen Perkeretaapian melaporkan kepada Menhub sebelum proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum |
| 4. | RPM tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta | 2026 | Menunggu pembahasan oleh Biro Hukum |
| 5. | RPM tentang Lalu Lintas Kereta Api | 2026 | Menunggu pembahasan oleh Biro Hukum |
| 6. | RPM tentang Akreditasi Badan Hukum dan Lembaga Diklat SDM Perkeretaapian | 2026 | Proses penelaahan dan reviu Biro Hukum |

# PERATURAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 7. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1134 Tahun 2026 tentang Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2026 | 2026 | Telah terbit pada tanggal 17/07/2026 |
| 8. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1100 Tahun tentang Penetapan Spesifikasi Teknis Peralatan Keselamatan Tertentu pada Perpotongan Sebidang | 2026 | Telah terbit pada tanggal 26/08/2026 |

# POSISI PEKERJAAN BAGIAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

# PERATURAN TRANSPORTASI LAUT (KESELAMATAN & KEAMANAN PELAYARAN)

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran | 2026/2027 | Proses permintaan nama tim PAK |
| 2. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Perlintasan Bojonegara Provinsi Banten | 2026/2027 | Menunggu penetapan Menteri Perhubungan (Per 10 September 2026) |
| 3. | Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim | 2026/2027 | Menunggu arahan Menteri Perhubungan untuk proses pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum |
| 4. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia | 2026/2027 | Proses penyusunan di Biro Hukum |
| 5. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sungai Nyamuk/Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |

# PERATURAN TRANSPORTASI LAUT
# (KESELAMATAN & KEAMANAN PELAYARAN)

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 6. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tarakan/Malundung, Provinsi Kalimantan Utara | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |
| 7. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Bunyu, Provinsi Kalimantan Utara | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |
| 8. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |
| 9. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Susoh, Provinsi Aceh | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |

# PERATURAN TRANSPORTASI LAUT (KESELAMATAN & KEAMANAN PELAYARAN)

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 10. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sirombu, Provinsi Sumatera Utara | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |
| 11. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Subi, Provinsi Kepulauan Riau | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |
| 12. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Ereke, Provinsi Sulawesi Tenggara | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |
| 13. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Barus Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |

# PERATURAN TRANSPORTASI LAUT (KESELAMATAN & KEAMANAN PELAYARAN)

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 14. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Molawe, Provinsi Sulawesi Tenggara | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |
| 15. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Serasan, Provinsi Kepulauan Riau | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |
| 16. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pulau Baai, Provinsi Bengkulu | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |
| 17. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2026 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Langara, Provinsi Sulawesi Tenggara | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |

# PERATURAN TRANSPORTASI LAUT (KESELAMATAN & KEAMANAN PELAYARAN)

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 16. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Menuju Terminal Khusus PT Amanah Anugerah Adi Mulia oleh PT Amanah Anugerah Adi Mulia | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |
| 17. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Menuju Terminal Khusus PLTU Tanjung Jati B Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B (Unit 1-4) Jepara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 2026 | Telah dibuat salinan dan dipublikasikan di JDIH |

# PERATURAN TRANSPORTASI LAUT (KEPELABUHANAN)

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Selat Lampa | 2026 | menunggu penetapan Bapak Menteri Perhubungan (pertanggal 4 Juni 2025) |
| 2. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Celukan Bawang | 2026/2027 | menunggu penetapan Bapak Menteri Perhubungan, telah diusulkan melalui Surat Sekretaris Nomor HK. 203/2/25/SKJ/2025 tanggal 19 Juni 2025 dan telah diusulkan kembali melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor HK.203/1/16/SKJ/2026 tanggal 21 Mei 2026 |
| 3. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Wangi | 2026/2027 | menunggu penetapan Bapak Menteri Perhubungan, telah diusulkan melalui Surat Sekretaris Nomor HK. 203/2/2/SKJ/2025 tanggal 3 Juni 2025 dan Nomor HK.203/2/25/SKJ/2025 tanggal 19 Juni 2025, serta telah diusulkan kembali melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor HK.203/1/16/SKJ/2026 tanggal 21 Mei 2026 |
| 4. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Panjang | 2026/2027 | menunggu penetapan Bapak Menteri Perhubungan, telah diusulkan melalui Surat Sekretaris Nomor HK. 203/2/20/SKJ/2025 tanggal 28 Mei 2025 dan telah diusulkan kembali melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor HK.203/1/16/SKJ/2026 tanggal 21 Mei 2026 |
| 5. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayur | | menunggu penetapan Bapak Menteri Perhubungan yang diusulkan melalui Surat Sekretaris Nomor HK.203/1/16/SKJ/2026 tanggal 21 Mei 2026 |

# PERATURAN TRANSPORTASI LAUT (KEPELABUHANAN)

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 6. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Labuan Bajo | 2026/2027 | menunggu penetapan Bapak Menteri Perhubungan, telah diusulkan melalui Surat Sekretaris Nomor HK.203/1/16/SKJ/2026 tanggal 21 Mei 2026 |
| 7. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Pulang Pisau | 2026/2027 | menunggu penetapan Bapak Menteri Perhubungan, telah diusulkan melalui Surat Sekretaris Nomor HK.203/1/16/SKJ/2026 tanggal 21 Mei 2026 |
| 8. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional | 2026 | Telah diselenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 3 September 2026 berdasarkan Surat Undangan Kepala Biro Hukum Nomor AL.301/1/8/STJ/2026 tanggal 1 September 2026. Adapun hasil pembahasan disepakati bahwa Tim Direktorat Kepelabuhanan dan Tim Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan akan menyampaikan draf final RKM paling lambat tanggal 14 September 2026 |

# PERATURAN TRANSPORTASI LAUT
## (ANGKUTAN DI PERAIRAN)

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan | 2026 | Published |

# POSISI PEKERJAAN BAGIAN PERATURAN UDARA, INTEGRASI TRANSPORTASI, MULTIMODA DAN PENUNJANG

# PERATURAN TRANSPORTASI UDARA

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Rancangan Keputusan Menteri tentang Open Sky | 2026/2027 | Posisi telah naik ke Menhub dan telah mendapatkan dispsosisi Ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk memberikan Penjelasan |
| 2. | Rancangan Peraturan Menteri tentang CASR 175 | 2026/2027 | Posisi telah selesai pembahasan Harmonisasi dan telah proses persetujuan penetapan oleh Menhub namun mendapatkan dispsosisi/arahan Ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk memberikan Penjelasan |
| 3. | Rancangan Peraturan Menteri tentang Tarif Angkutan Udara | 2026/2027 | Posisi telah selesai pembahasan Harmonisasi dan telah proses persetujuan penetapan oleh Menhub namun mendapatkan dispsosisi/arahan Ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk memberikan Penjelasan |
| 4. | Rancangan Peraturan Menteri tentang CASR 173 | 2026/2027 | Posisi telah selesai pembahasan Harmonisasi dan telah proses persetujuan penetapan oleh Menhub namun mendapatkan dispsosisi/arahan Ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk memberikan Penjelasan |
| 5. | Rancangan Keputusan Menteri tentang Bandar Udara Dirung | 2026/2027 | Posisi telah naik ke Menhub dan telah mendapatkan dispsosisi Ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk memberikan Penjelasan |

# PERATURAN TRANSPORTASI UDARA

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 6. | RPM tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 tentang Lisensi Ahli Perawatan Pesawat Udara dan Sertifikat Personel Pengesahan Perawatan Pesawat Udara | 2026/2027 | Posisi telah selesai pembahasan Harmonisasi dan telah proses persetujuan penetapan oleh Menhub namun mendapatkan dispsosisi/arahan Ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk memberikan Penjelasan |
| 7. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2026 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan | 2026 | ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026 dan diundangkan pada tanggal 3 Februari 2026 dalam Berita Negara Tahun 2026 Nomor 76 serta telah di Publikasi di JDIH |
| 8. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2026 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 tentang Tanda Identifikasi Produk dan Artikel serta Tanda Kebangsaan Indonesia, dan Tanda Pendaftaran Indonesia Pesawat Udara Sipil Indonesia | 2026 | ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2026 dan diundangkan pada tanggal 3 Juli 2026 dalam Berita Negara Tahun 2026 Nomor 439 serta telah di Publikasi di JDIH |
| 9. | Peraturan Menteri Nomor PM 6 Tahun 2026 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 tentang Pendaftaran Pesawat Udara | 2026 | yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2026 dan diundangkan pada tanggal 21 Juli 2026 dalam Berita Negara Tahun 2026 Nomor 494 serta telah di Publikasi di JDIH |
| 10. | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2026 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (Fuel Surcharge) untuk Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 M/1447 H | 2026 | telah ditetapkan pada Tanggal 6 Februari 2026 dan telah di Publikasi di JDIH |

# PERATURAN TRANSPORTASI INTEGRASI TRANSPORTASI MULTIMODA

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Rancangan Undang Undang tentang Sistem Transportasi Nasional | 2027 | Sedang berlanjut pembahasan melalui rapat antar kementerian |
| 2. | Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi | 2026 | ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026 dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2026 dalam Berita Negara Tahun 2026 Nomor 71 serta telah di Publikasi di JDIH |
| 3. | Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda | 2026 | ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2026 dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 2026 dalam Berita Negara Tahun 2026 Nomor 431 serta telah di Publikasi di JDIH |

# PERATURAN TRANSPORTASI PENUNJANG

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | RKM tentang Burden & Sharing Resources Pengelolaan TIK di Lingkungan Kemenhub | 2027 | sedang diminta saran/tanggapan terkait materi muatan/pengaturannya kepada Biro Perencanaan dan Biro Keuangan |
| 2. | RKM tentang Peta Jalan Penyelenggaraan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Transportasi | 2026 | proses paraf Pejabat Eselon II terkait dan Eselon I |
| 3. | Rancangan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Percepatan Transformasi Digital dan Digitalisasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenhub | 2026 | posisi sudah di Menteri Perhubungan (26/8), menunggu perkenan penetapan |
| 4. | RKM tentang Perubahan atas KM 86 Tahun 2026 tentang Pembentukan Komite Audit Kementerian Perhubungan | 2026 | proses paraf Pejabat Eselon I dan Eselon II terkait |
| 5. | RKM tentang Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan | 2026 | masih harus dilakukan pembahasan dengan pemrakarsa dan unit kerja terkait di Kemenhub |
| 6. | Rancangan Keputusan Sesjen tentang Tim Asesor Internal Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Kementerian Perhubungan Tahun 2026 | 2026 | menunggu hasil rapat pembahasan RKM Pemdi dengan pemrakarsa dan unit kerja terkait di Kemenhub |
| 7. | Rancangan Surat Edaran Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Kewaspadaan Keamanan Siber dan Himbauan Terkait Judi Online di Lingkungan Kementerian Perhubungan | 2026 | sedang dikoordinasikan kepada pemrakarsa Pusdatin untuk dilakukan drafting dan reformulasi ulang terkait materi muatan yang akan diatur |

# PERATURAN TRANSPORTASI PENUNJANG

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 8. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kementerian Perhubungan Corporate University | 2026 | Penyusunan paparan muatan materi kepada Menteri Perhubungan |
| 9. | RKM Perhubungan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi | 2026 | dikembalikan ke BPSDMP dengan pertimbangan mengubah instrumen menjadi RPM dan menunggu jadwal paparan ke menteri |
| 10. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan Ketua Panitia Pusat Penyelenggaraan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2026 | 2026 | menunggu paraf relaas dan TTD pak sekjen |
| 11. | Rancangan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Tindak Lanjut Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 | 2026 | proses *legaldrafting* di biro hukum |
| 12. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah | 2026 | sedang menunggu proses tindaklanjut dari biro perencanaan yang berkoordinasi dengan masing-masing Unit Kerja Eselon I |
| 13. | Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan | 2026 | menunggu status pengundangan oleh Kementerian Hukum |

# PERATURAN TRANSPORTASI PENUNJANG

| No. | PEKERJAAN | TARGET WAKTU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 14. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rumpun Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan | 2026 | proses legaldrafting di biro hukum |
| 15. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang BP-3 Perhubungan | 2026 | Penyusunan paparan muatan materi kepada Menteri Perhubungan |
| 16. | Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Perhubungan | 2026 | Penyusunan paparan muatan materi kepada Menteri Perhubungan |
| 17. | RKM tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok dan RKM tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jbatan di lingkungan UPT BPSDMP | 2026 | Penyusunan paparan muatan materi kepada Menteri Perhubungan |
| 18. | RKM tentang Pedoman Pencegahan, Penanganan, dan Pembinaan Disiplin Pegawai terkait Perbuatan Asusila di lingkungan Kementerian Perhubungan | 2026 | Penyusunan paparan muatan materi kepada Menteri Perhubungan |
| 19. | RKM tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Displin PPPK di lingkungan Kementerian Perhubungan | 2026 | dikembalikan ke biro SDMO dengan pertimbangan mengubah instrumen menjadi RPM dikarenakan mengatur sanksi administratif |